

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Waktu :10.00 Wita-selesai
Tempat :Ruang Rapat Departemen Ilmu
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

BIOGRAFI ROSMIANI ACHMAD 1961-2004



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin**

OLEH

APRILIANTI SAWE

F061171304

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSA

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

BIOGRAFI ROSMIANI ACHMAD 1961-2004

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2022



1. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum.

Ketua

2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Sekretaris

3. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.

Penguji I

4. Nasihin, S.S., M.A.

Penguji II

5. Dr. Nahdiah Nur, M.Hum.

Konsultan I

6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Konsultan II

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : APRILIANTI SAWE

NIM : F061171304

Departemen/program studi : Ilmu Sejarah/Strata satu (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

BIOGRAFI ROSMIANI ACHMAD 1961-2004

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarism dan tidak dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 03 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,


APRILIANTI SAWE

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur penulis pajatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, hikmat, serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Biografi Rosmiani Achmad Tahun 1961-2004”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Stara Satu (SI) guna mendapat gelar Sarjana dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak dapat dipungkiri penulis mengalami bermacam kendala, dimulai dari pandemi covid-19, proses pentuan judul yang beberapa kali mengalami pergantian, penulis yang mengalami sakit yang mengakibatkan harus dirawat jalan beberapa bulan dan puji Tuhan sudah sembuh, kurangnya sumber dan literatur yang sesuai dengan objek penelitian, narasumber yang sulit untuk dihubungi karena berada diluar provinsi dan salah satu narasumber yang meninggal dunia setelah penulis melaksanakan ujian proposal sehingga dalam proses pengerjaan membuat penulis merasa kesulitan. Namun atas berkat Tuhan Yesus dan bantuan dari beberapa pihak serta pembimbing yang selalu mengarahkan dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan akan adanya saran yang bersifat membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian dalam kepenulisan-kepenulisan berikutnya.

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada kedua orangtua yang tercinta, Bapak **Nasrun Pasombo** dan ibu **Mince Pasae** atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini, terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anaknya dan selalu mengusahakan memberi yang terbaik, kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjaga kita semua. Kepada saudara penulis Kakak **Ns. Julniarce, S.Kep**, Adik **Meris Trivina Sawe** dan **Gabriel**, terima kasih atas segala support yang diberikan serta menjadi teman cerita dan teman bertengkar bagi penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** selaku pembimbing 1 dan sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) dari awal hingga menjelang akhir penyelesaian skripsi penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. **Drs. Dias Pradadimara. M.A., M.S** selaku pembimbing II dan sekaligus banyak memberi masukan dari sejak awal mencari tema penelitian bahkan banyak memberi masukan dalam proses penyusunan proposal. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan, masukan, motivasi dan waktu yang diberikan, terima kasih telah berbagi ilmu dan memberi masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Ilham, S.S., M.Hum** selaku ketua Departemen Ilmu Sejarah dan **Andi Lili Evita, S.S., M.Hum** selaku sekretaris Departemen Ilmu Sejarah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen pengajar Ilmu Sejarah atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah Yakin: **Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum, Dr. Bambang Sulistyو Edi Purwanto, M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A., Nasihin, S.S.,M.A., Dr. Ida Lina Tanjung M.Hum., Alm. Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S, dan Alm. Prof Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A.**
4. Terima kasih kepada kepala Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah yakni **Uddjie Usman Pati, S.Sos.**, yang banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan. dan juga
5. Kak **Alief Nur Situdju M.N. Nadjamuddin, S.S** selaku asisten dosen Pak Dias yang selalu membantu penulis selama masa bimbingan dan selalu penulis repotkan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. **Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin** beserta jajarannya, terkhusus staf pegawai yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
7. Kepala Badan Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan beserta para staf yang telah memberikan layanan pembacaan arsip sehingga

membantu penulis dalam mencari sumber yang diperlukan. Penulis ucapkan terima kasih kepada **Kak Kasma** dan **kak Hasnah** yang selalu ramah dan menolong penulis ketika arsip sulit untuk dibaca.

8. Terima Kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberi data serta informasi kepada penulis, terkhususnya kepada **Pak Muhammad Ridwan Alimuddin, Alm. Prof. Dr. Alfian Noor, M.Sc, Pak Suradi Yasil, dan Pak Idham Khalid Bodi**. Penulis menyadari tanpa bantuan dari para narasumber sulit untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dekat penulis yang menemani di awal kuliah sekaligus berjuang bersama dalam melakukan penelitian kepada **Musdalipah, Renaldi, Tribudi, Irfan, Ramin, Khaerani, Faridah, Rismayani Banne, Jannah, Vivin Rindiani, dan Rustan**. Terima kasih untuk waktu dan dukungan yang diberikan, untuk kegilaan, canda tawa maupun kisah sedih selama masa perkuliahan yang nantinya menjadi kisah yang indah asikkkkk, kalian luar biasaaa. Terimakasih kepada **Musdalipah** yang selalu menemani penulis dalam melakukan wawancara bersama narasumber, yang memarahi penulis jika tidak mengerjakan skripsi atau malu menemui narasumber, teman nonton drakor dan teman curhat tentang banyak hal.
10. Terima kasih untuk teman-teman Ilmu Sejarah 17 **Alifka, Aya, Ainung, Arika, Anisa, Bella, Bayu, Budi, Claudia, Caca, Faridah, Fahmi, Ilham, Ipeh, Ismi, Irfan, Ikhsan, Jannah, Jihad, Mimi, Renaldi, Rani, Rustan,**

Ramin, Rifsan, Risma, Sasa, Taufik, Vivin dan Yusrah. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian terindah dalam hidup penulis untuk setiap kenangan yang telah dibuat akan menjadi sebuah kisah yang tidak terlupakan.

11. Teman-teman dekat penulis **Irvani Aurelia Rante Tana, Salmawati Husain dan Uly Florenzia Sagala,** walaupun kita berbeda jurusan bahkan berasal dari daerah yang berbeda tidak menghalangi kita untuk berteman. Terima Kasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan berbagai cerita yang lebih seru, semoga keinginan nonton konser Bangtan dapat terwujud wkwkw...Kalian manusia-manusia yang kuat, banyak hal yang tidak mengenakan yang sudah di lalui terima kasih untuk tetap bertahan. Semoga kedepannya hal-hal baik selalu menyertai kita semua.
12. **Keluarga Besar PMKO Sastra Unhas** yang memberi kesempatan bagi penulis untuk aktif bersama dalam pelayan di kampus, bertumbuh bersama dalam pelayan, dan selalu memberi semangat, motivasi serta doa bagi penulis dalam setiap pergumulan maupun sukacita. tetap saling merangkul dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Tuhan Yesus Memberkati.
13. **Keluarga Besar Humanis KMFIB-UH** yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi serta yang selalu mengajarkan arti kekeluargaan.
14. Kawan-kawan **Pallawa 2017 dan Pramoedya 2017** penulis ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.

Kepada teman-teman atau berbagai pihak yang belum sempat penulis sebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan dan penelitian. Penulis menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersikap membangun. akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak orang. terimakasih

Aprilianti Sawe

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1. 2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat	6
1. 5 Tinjauan Pustaka	7
1.5.1 Landasan Teoritis	7
1.5.2 Penelitian yang relevan	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KEHIDUPAN ROSMIANI ACHMAD	16

2.1	Latar Belakang Kehidupan Rosmiani Achmad.....	16
2.1.1	Masa Kecil Hingga Menempuh Pendidikan.....	16
2.1.2	Masa Dewasa Dan Mulai Bekerja.....	19
2.1.3	Kehidupan Berumah Tangga.....	20
2.2	Pengalaman Organisasi Pada Masa Remaja Hingga Dewasa	28
2.3	Lingkungan Politik Rosmiani Achmad.....	32
2.3.1	Masa Orde Lama 1950-1965	32
2.3.2	Masa Orde Baru 1965-1998	41
2.3.3	Masa Reformasi 1998-2004	49
BAB III KIPRAH ROSMIANI ACHMAD DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PDAERAH GOTONG ROYONG KOTAPRAJA MAKASSAR TAHUN 1961-1969.....		53
3.1	Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.....	53
3.2	Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kotapraja Makassar Tahun 1961-1969	56
3.3	Terangkatnya Rosmiani Achmad Sebagai Anggota DPRD-GR.....	58
3.4	Perwakilan Delegasi Mengenai Permasalahan Air Minum dan Listrik	61
3.5	Keterlibatan Dalam Usulan Pergantian Nama Makassar Menjadi Ujung Pandang.....	67
3.6	Ketua Dalam Bidang Kemasyarakatan	68
BAB IV KIPRAH ROSMIANI ACHMAD SESUDAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA UJUNG PANDANG TAHUN 1971-2004.....		73
4.1	Aktivitas Rosmiani Achmad Setelah Di DPRD-GR.....	73

4. 2 Gagasan Awal Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat	75
4.3 Keterlibatan Rosmiani Achmad Dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ..	80
BAB V PENUTUP	87
KESIMPULAN	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

ABSTRAK

Aprilianti Sawe (F061171304) dengan judul “Biografi Rosmiani Achmad 1961-2004” dibimbing oleh Dr. Nahdiah Nur, M.Hum., dan Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S.

Penelitian ini membahas tentang biografi Rosmiani Achmad tahun 1961-2004. penelitian ini lebih mengarah pada kiprah Rosmiani Achmad di politik. fokus penelitian di mulai pada tahun 1961 yaitu saat Rosmiani Achmad terangkat menjadi anggota DPRD-GR Kotapraja Makassar hingga pada tahun 2004 saat Rosmiani terlibat dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah.

Hasil peneliiian ini menunjukan bahwa Rosmiani Achmad atau semasa kecil dikenal dengan Rosmiani Ongan adalah perempuan yang berasal dari salah satu daerah di Sulawesi Barat yaitu daerah Sepang Tinambung. Rosmiani merupakan salah satu anggota DPRD-GR Kotapraja Makassar dan satu-satunya perwakilan golongan wanita yang periodenya dimulai dari tahun 1961-1969 dan merupakan anggota dewan wanita terlama. Keterlibatannya dalam dunia politik dimulai ketika Rosmiani aktif dalam organisasi Kebangunan wanita Indonesia Mandar dan organisasi gerakan wanita partai syarikat IslamIndonesia. Pada tahun 1956 Rosmiani dan suami memilih untuk pindah ke Makassar dan merintis karir dikota tersebut. Pada tahun 1961 Rosmiani terangkat sebagai anggota DPRD-GR Kotapraja Makassar, dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD-GR Rosmiani pernah menjadi perwakilan delegasi membicarakan mengenai penjernihan air dan masalah listrik. Selain itu beliau juga terlibat dalam memberi usulan mengenai pergantian nama Kotapraja Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang dan sebagai ketua dalam bidang kemasyarakatan. Pada tahun 1969 Rosmiani memiih untuk berhenti sebagai anggota DPRD-GR atas permohonan sendiri. Rosmiani Juga terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sejak awal munculnya gagasan tersebut hingga pada tahun 2004 terbentuk menjadi provinsi. Pada tahun 2009 Rosmiani ditetapkan sebagai salah satu pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat oleh Gubernur Sulbar dan pada tahun 2013 mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi atas jasa-jasanya dalam mengawal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Rosmiani Achmad, DPRD-GR Kotapraja Makassar, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

ABSTRACT

Aprilianti Sawe (F061171304) with the title "Biography of Rosmiani Achmad 1961-2004" was supervised by Dr. Nahdiah Nur, M. Hum., and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

This study discusses the biography of Rosmiani Achmad in 1961-2004. This research is more directed to Rosmiani Achmad's role in politics. The focus of the research began in 1961, when Rosmiani Achmad was appointed a member of the DPRD-GR Makassar Municipality until 2004 when Rosmiani was involved in the formation of the Province of West Sulawesi. The method used in this research is the historical method.

The results of this study indicate that Rosmiani Achmad or as a child known as Rosmiani Ongan is a woman who comes from one area in West Sulawesi, namely the Sepang Tinambung area. Rosmiani is a member of the Makassar Municipal DPRD-GR and the only representative of the women's group whose period started from 1961-1969 and is the longest-serving member of the women's council. Her involvement in politics began when Rosmiani was active in the Indonesian Women's Awakening organization Mandar and the women's movement organization the Indonesian Islamic Syarikat Party. In 1956 Rosmiani and her husband chose to move to Makassar and start a career in that city. In 1961 Rosmiani was appointed as a member of the DPRD-GR Makassar City, in carrying out her duties as a member of the DPRD-GR Rosmiani had been a representative of the delegation discussing water purification and electricity problems. In addition, he was also involved in making suggestions for changing the name of Makassar Municipality to Ujung Pandang Municipality and as chairman of the community sector. In 1969 Rosmiani chose to quit as a member of the DPRD-GR at her own request. Rosmiani was also involved in the process of forming the Province of West Sulawesi from the beginning of the idea until in 2004 it was formed into a province. In 2009 Rosmiani was appointed as one of the fighters for the formation of the Province of West Sulawesi by the Governor of West Sulawesi and in 2013 received an award from the provincial government for his services in guarding the formation of the Province of West Sulawesi.

Keywords: Rosmiani Achmad, DPRD-GR Makassar Municipality, establishment of West Sulawesi Province.

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

NO	Singkatan dan istilah	Keterangan
1	ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2	BP4	Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
3	BAPNAS	Badan Permufakatan Nasional
4	Controller	Sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada pada pemerintahan Hindia Belanda. Controller dianggap sebagai koordinator pengawasan dari pemerintah belanda hingga ke tingkat paling rendah.
5	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	DPRD-GR	Dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong
7	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
8	DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
9	DPD	Dewan Perwakilan Daerah
10	GERWANI	Gerakan wanita Indonesia
11	GERWAPSI	Gerakan wanita Partai S
12	GOLKAR	Golongan karya
13	G30/S	Gerakan 30 september
14	KMB	Konferensi Meja Bundar
15	KRIS MUDA	Kebangkitan Rahasia IslamMuda
16	KWI	Kebangunan Wanita Indonesia Mandar
17	Kweek School	Sekolah Pendidikan Guru

18	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
19	NIT	Negara Indonesia Timur
20	NICA	Nedherlands Indies Civil Administration
21	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
22	NU	Nahdlatul Ulama
23	PARPOL	Partai Politik
24	PARKINDO	Partai Kristen Indonesia
25	PERPIM	Persatuan Pelajar Indonesia Mandar
26	PDI	Partai Demokrasi Indonesia
27	PKI	Partai komunis Indonesia
28	PKR	Partai Kedaulatan Rakyat
29	PNI	Partai Nasional Indonesia
30	PP	Peraturan Pemerintah
31	PPP	Partai Persatuan Pembangunan
32	PRN	Partai Rakyat Nasional
33	PRI	Partai Rakyat Indonesia
34	PSII	Partai Syarikat Islam Indonesia
35	RIS	Republik Indonesia Serikat
36	RI	Republik Indonesia
37	SESPA	sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi
38	SIBALIPARI	Budaya Kerjasama Antaralaki-laki dan Perempuan
39	SGN	Sekolah Guru Negeri

40	UU	Undang-Undang
41	UU DS	Undang-Undang Dasar Sementara
42	Volkschool	sekolah desa dengan lama pendidikan 3 tahun dan menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar
43	Vervolg School	Sekolah lanjutan dari sekolah desa yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar sekolah ini 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik dari sekolah desa.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Anggota DPRD-GR Makassar Tahun 1961/1971

DAFTAR GAMBAR

Foto 1 : Foto Rosmiani Achmad (kelima dari kiri) bersama teman-temanya.

Foto 2 : Foto piagam penghargaan Nur aini Achmad diantaranya surat tanda jasa pahlawan dan medali perjuangan angkatan-45.

Foto 3 : Foto keluarga Rosmiani Achmad

Foto 4 : Foto Sekolah Kepandaian Puteri. S.K.P Madjene

Foto 5 : Foto Rosmiani Achmad (tengah) saat tampil di acara PSII

Foto 6 : Foto penghargaan Rosmiani Achmad

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum sejarah mengenai perempuan banyak mengalami dinamika pasang surut dalam perkembangannya, seperti peran perempuan dalam dunia usaha, perempuan dalam politik, perempuan dan organisasi dan sebagainya. Dalam menulis peranan perempuan, seorang peneliti harus memberi gambaran mengenai tokoh tersebut dan sumbangan apa yang diberikan.¹

Berbicara mengenai sejarah perempuan, seorang peneliti dapat menulis biografi dari salah satu tokoh perempuan yang menggambarkan pribadi yang patut diteladani. Dalam penulisannya ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti kekuasaan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zamannya, kesempatan yang datang, serta kepribadian tokoh. Sehubungan dengan kepribadian tokoh, sebuah biografi perlu memperhatikan latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial-budaya, dan perkembangan diri dari tokoh tersebut.² Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada salah seorang perempuan Mandar yang aktif dalam dunia politik dari masa muda hingga masa tuanya. Rosmiani Achmad semasa hidup aktif dalam berbagai organisasi politik, beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar pada tahun 1961-

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.114.

² Hidayati Djoeffan, "Gerakan feminisme di Indonesia tantangan dan strategi mendatang", *mimbar* 3:17, (Juni-September, 2001), hlm. 206.

1969 atau disingkat DPRD-GR TK II Kotapraja Makassar, seperti yang diketahui pada masa itu untuk perwakilan perempuan yang menjabat anggota DPRD-GR TK II sangat rendah, beliau juga aktif dalam forum Sipamandar salah satu organisasi yang mempelopori terbentuknya provinsi Sulawesi Barat organisasi ini terbentuk tahun 1994.³

Keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik masih terbelang rendah dibandingkan kaum laki-laki, sehingga dapat menimbulkan kebijakan yang tidak berpihak kepada peningkatan kualitas perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan hal penting untuk menyampaikan segala aspirasi dari semua golongan. Peranan perempuan bukan menjadi suatu hiasan dalam parlemen tapi perempuan juga memiliki hak dalam menentukan pilihan, menjadi pemimpin serta membuat atau terlibat dalam pembuatan kebijakan. Keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai merupakan salah satu prasyarat untuk memastikan terpenuhinya kepentingan kaum perempuan dan menghasilkan kebijakan yang tidak bias gender.⁴ Selain itu pengintegrasian kaum perempuan, baik dalam hal jumlah maupun ide, ke dalam suatu proses penting tetapi secara luas dianggap tidak

³ Dedy, *Terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat: Latar Belakang dan Peranan Pemuda Mahasiswa 1999-2004* (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin 2011), hlm.44

⁴ Theresia Pratiwi, "Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan di Indonesia", *interaksi: Jurnal ilmu komunikasi*.vol. 9: 2, (2020), hlm. 124.

menarik.⁵ Pemahaman seperti ini yang masih berkembang di masyarakat dan membuat keterwakilan perempuan jarang diperhitungkan

Beberapa kaum perempuan Sulawesi Selatan yang cukup berperan dalam politik di Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya Salawati Daud. Salawati Daud terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu 1955 dan berkedudukan di seksi pertahanan dan keamanan. Selain itu sosok perempuan lain yang memiliki peran di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Hilda Towoliu Hermanes. Hilda Towoliu pernah menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Makassar tahun 1957.⁶ Berkaitan dengan itu, peran politik perempuan tidak boleh diabaikan, perempuan juga ikut berperan dalam perjalanan politik di Indonesia tapi hanya sedikit yang mendapat perhatian publik. Rosmiani Achmad merupakan salah satu anggota DPRD-GR TK II Kotapraja Makassar untuk kaum perempuan dengan jabatan terlama, selain itu beliau juga aktif berjuang untuk memajukan daerah asalnya. Dalam penelitian ini, penulis berfokus mengenai biografi Rosmiani Achmad baik ketika aktif pada lembaga legislatif tahun 1961-1969 dan ketika beliau terlibat dalam berbagai organisasi politik serta keterlibatan beliau dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Di sisi lain penulis juga melakukan pengamatan terhadap sistem kekerabatan dari Rosmiani Achmad dengan memperhatikan latar belakang organisasi dan keluarga.

⁵ Joni Lovenduski, "Politik Berparas Perempuan", (Yogyakarta: Kanisius 2005), hlm. 32.

⁶ Budi Susanto, ed, *Politik & Postkolonialitas Di Indonesia*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2003), hlm. 185.

Rosmiani Achmad semasa muda aktif dalam organisasi persatuan pelajar Mandar (PERPIM) 1946-1948 dan Kebangunan Wanita Indonesia Mandar (KWI) 1948-195 dalam organisasi ini Rosmiani menjabat sebagai ketua. Selain itu dalam organisasi politik PSII Rosmiani aktif sebagai ketua gerakan wanita PSII cabang Majene tahun 1950-1956. Ketika Rosmiani Achmad pindah ke Daerah Makassar, beliau aktif dalam organisasi sayap gerakan wanita PSII pada tahun 1958, Rosmiani Achmad juga terlibat dalam proses pengusulan pergantian nama Makassar menjadi Ujungpandang.⁷ Dalam penelitian sejarah, selain menjelaskan latar belakang tokoh dalam penulisan biografi, penting juga menjelaskan mengenai situasi atau keadaan yang terjadi pada masa itu. Sehingga peneliti dapat menghasilkan gambaran keseluruhan mengenai peristiwa yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Rosmiani Achmad merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tingkat II Kotapraja Makassar tahun 1961-1969 dari Golongan Karya Wanita. Dalam surat keputusan yang ditetapkan pada tanggal 30 November 1960 Nomor 1698/A dan dilantik pada 4 Januari 1961 oleh Gubernur Kolonel A.A Rivai.⁸ Rosmiani Achmad selaku anggota legislatif mempunyai peran sebagai anggota dari bidang kesejahteraan, menjadi utusan/ anggota delegasi Sulseltra yang terdiri dari empat orang untuk menghadap kepada menteri PUTL (pekerjaan umum dan tenaga

⁷ Haliadi Saidi, *Kiprah Gender Perempuan Mandar Sebuah Buku Biografi*, (Makassar: Yayasan Mitra Sains 2002), hlm.110.

⁸ *Ibid.*, hlm 52

listrik).⁹ Selain itu pada tahun 1969 beliau menjadi ketua di bidang kemasyarakatan.¹⁰ Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 8 November 1969 dalam hal peremajaan anggota legislatif Nomor 397/XI/-69. Rosmiani Achmad salah satu anggota yang berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong atas permintaannya sendiri. Setelah berhenti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Rosmiani Achmad tetap aktif dalam organisasi politik. beliau juga ikut serta dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sebagai perwakilan perempuan. Provinsi Sulawesi Barat merupakan sebuah daerah pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2004.¹¹ Dari uraian di atas, maka penulis akan meneliti tentang biografi Rosmiani Achmad dimulai sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Makassar dan sesudahnya.

1. 2 Batasan Masalah

Penelitian dalam kajian sejarah tentunya menggunakan batas temporal (waktu) dan batas spasial (tempat) keduanya diperlukan agar penelitian sejarah yang hendak dilaksanakan dapat dijelaskan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebelumnya. Adapun batasan temporal dari penelitian ini adalah sejak tahun 1961, dimana Rosmiani Achmad dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

⁹ Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988 No.Reg.700a DPRD kotamadya ujungpandang seri laporan-laporan tahun 1961-1986 tentang kegiatan DPRD kotamadya ujung pandang.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

berakhir pada tahun 2004 ketika terjadi pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan batasan spasial yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Makassar. Pemilihan lokasi dalam penelitian berdasarkan pertimbangan dekat dan banyaknya sumber, hal ini dilakukan agar penelitian dapat terfokus dan dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Sehingga dari penjelasan di atas maka penelitian skripsi ini kemudian berjudul

Biografi Rosmiani Achmad Tahun 1961-2004.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis berupaya mengkaji penelitian ini dengan merumuskan persoalan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kiprah Rosmiani Achmad di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Makassar 1961-1969
2. Bagaimana Kiprah Rosmiani Achmad sesudah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang 1971-2004?

1.4 Tujuan Dan Manfaat

Dalam melakukan penelitian ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan dan melengkapi mengenai historiografi tentang peran Rosmiani Achmad dalam dunia politik

terkhususnya di DPRD-GR Kotapraja Makassar, serta untuk mengetahui keterlibatan Rosmiani Achmad dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah koleksi penulisan sejarah dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah terutama mengenai peranan perempuan dalam politik Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan. Memberi gambaran mengenai aktivitas Rosmiani Achmad di dunia politik serta kontribusinya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Sebagai literatur bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1. 5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Teoritis

Menurut Denzin Biografi merupakan studi pengalaman seorang individu yang diceritakan oleh peneliti atau ditemukan di dalam dokumen atau arsip. Metode biografi merupakan studi yang menggunakan kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang dan menurut Safari Daud biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal.¹² Jadi bisa disimpulkan bahwa biografi adalah tulisan yang mengungkapkan kehidupan dan pengalaman seseorang dari waktu

¹² Daud, Safari, "Antara Biografi dan Historiografi (studi 36 buku biografi di Indonesia)", *analisis*, Vol XIII, No. 1 (Juni 2013), hlm 245.

ke waktu. biografi lebih menitik beratkan pada sejarah kehidupan seseorang yang sedang diteliti.

Menurut Kuntowijoyo ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian tentang biografi yaitu kepribadian tokoh dalam hal ini perlu memperhatikan latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial budaya dan pengembangan diri. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zamannya dan keberuntungan atau kesempatan yang datang. Sebenarnya sebuah biografi tidak harus menulis tentang kehebatan atau heronya seseorang yang menentukan jalan sejarah cukup partisipasinya.¹³ Kuntowijoyo membagi dua macam biografi yaitu *portrayal* (portrait) dan *scientific* (ilmiah). Dalam biografi portrait biasanya peneliti lebih berusaha memahami tokoh, yang masuk dalam kategori ini yaitu biografi politik, bisnis, seni, olahraga dan lain sebagainya, sedangkan biografi *scientific* biasanya peneliti berusaha untuk menerangkan tokoh berdasarkan analisis ilmiah, pengguna konsep ini menghasilkan apa yang disebut sejarah kejiwaan.¹⁴

Dapat dikatakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan biografi portrait, yang mana peneliti berusaha memahami kehidupan tokoh, kesempatan apa yang dimiliki sehingga dapat terlibat sebagai anggota DPRD-GR serta keterlibatannya dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

¹³ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 206-207.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 208.

1.5.2 Penelitian yang relevan

Penelitian mengenai Biografi Rosmiani Achmad sudah pernah ada yang menulis. Karya tersebut lebih membahas mengenai latar belakang keluarga Rosmiani Achmad, bagaimana Rosmiani Achmad mendidik anak-anaknya sehingga berhasil tetapi belum membahas mengenai aktivitas Rosmiani Achmad secara rinci dalam kegiatan politik dan keterlibatan beliau dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. adapun sumber primer berupa arsip dan wawancara sedangkan sumber sekunder berupa: Buku *Sejarah Perkembangan Pemerintah Departemen Dalam Negeri Di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan* (1991) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Selatan. buku ini menjelaskan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah di Sulawesi Selatan baik dari masa Belanda sampai masa Orde Baru.

Selanjutnya buku dengan judul *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia* (2003) editor Budi Susanto. Buku tersebut memuat tulisan Siti Maryam tentang *Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Selatan*. Dalam buku ini, dibahas mengenai peran perempuan dalam dunia politik baik pada masa Orde Lama hingga masa Orde Baru. Selain itu digambarkan mengenai proporsi perempuan dalam lembaga legislatif di Sulawesi Selatan dari pemilu ke pemilu, dalam karya ini dijelaskan bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan dari periode 1950-1990 an.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (2003) dan *Pengantar Ilmu Sejarah* (2013). Buku menjelaskan mengenai metode penulisan sejarah, jenis penulisan sejarah di Indonesia termasuk sejarah peran wanita dan sejarah biografi. Dalam buku metodologi sejarah di paparkan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis sejarah wanita dan sejarah biografi.

Metodologi Sejarah (2020) yang ditulis oleh Helius Sjamsuddin, menjelaskan mengenai metode penulisan sejarah seperti langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian serta menjelaskan mengenai sejarah lisan atau ingatan lisan.

Haliadi Sadi dalam buku *Kiprah Gender Perempuan Mandar Sebuah Buku Biografi* (2002). Buku ini menjelaskan mengenai organisasi-organisasi apa saja yang pernah diikuti oleh Rosmiani Achmad, menjelaskan mengenai silsilah keluarga yang terbagi ke dalam garis patrilineal dan garis matrilineal serta bagaimana Rosmiani terpilih menjadi ibu teladan nasional tahun 1985-1986. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis lebih berfokus pada aktivitas Rosmiani Achmad dalam dunia politik khususnya di DPRD-GR dan dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Departemen Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam jurnal yang berjudul *Perempuan dan Politik*. Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki angka yang rendah, padahal jumlah perempuan hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh rendahnya komitmen negara untuk menjalankan aksi afirmasi, khususnya dalam

pemilihan umum. Aksi afirmasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan kursi perempuan di parlemen.

1.6 Metode Penelitian

Guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Tujuannya, untuk membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi dan penulisan.¹⁵

1. Pemilihan topik

Pemilihan topik harus berdasarkan topik sejarah. Dengan melakukan pemilihan topik penulis bisa mengetahui apa yang nantinya menjadi bahan objek penelitian, mengetahui batas geografi dan menetapkan batas waktu dalam arti sumber tertulis maupun lisan yang masih tersedia. Selanjutnya dalam pemilihan topik, penulis harus memiliki rencana penelitian yang berisi permasalahan, Historiografi, sumber sejarah, dan garis besar penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁶

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

2. Pengumpulan sumber

Pengumpulan sumber dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer (sumber utama) adalah data dari periode tahun yang sama dengan penelitian atau sezaman. Sumber ini yang nantinya menjadi acuan dalam proses penelitian penulis, di samping sumber-sumber pendukung lainnya berupa buku, karya ilmiah baik itu tesis, skripsi, jurnal, majalah dan lain-lain atau sumber sekunder. Adapun proses pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis di berbagai tempat, seperti ke badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Jl.Perintis Kemerdekaan KM. 12 No 146 ,Tamalanrea Kota Makassar, Sul-Sel). Dalam penelitian ini penulis menggunakan arsip yaitu inventaris arsip Kotamadya Pemerintah Ujung Pandang tahun 1926-1988 No.Reg 700 DPRD Kotamadya Ujung Pandang seri laporan-laporan tahun 1961-1986 tentang kegiatan-kegiatan DPRD kotamadya Ujung Pandang Reg.701 DPRD Kotamadya Makassar seri notulensi rapat tahun 1957-1985, Reg 724 surat-surat 26 Juni 1960-1976 tentang pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kotapraja Makassar, Reg. 726 wakil kepala daerah Makassar surat-surat tanggal 9 April 1969-1970 tentang peremajaan anggota DPRD dan masih ada beberapa arsip lagi. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu mengunjungi Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, perpustakaan Provinsi Wilayah Sulawesi Selatan untuk mencari referensi berupa buku, tesis dan juga skripsi serta tambahan sumber sekunder melalui pencarian dari internet yang dapat menunjang mengenai topik pembahasan penulis.

Dalam mengumpulkan sumber penelitian, penulis harus mengatur strategi dimana dan bagaimana penulis biasa mendapatkan bahan penelitian, menentukan narasumber dan instansi apa yang dapat penulis hubungi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, mengingat topik penelitian ini adalah peristiwa atau masalah kontemporer maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah lisan. Sejarah lisan atau ingatan lisan, yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang di wawancara oleh sejarawan.¹⁷ Sejarah lisan harus dilakukan dengan teliti. Banyak sekali permasalahan mengenai sejarah, bahkan dalam zaman modern ini yang tidak tertangkap dan terungkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian yang dianggap penting menurut pembuat dokumen dan zamanya, tetapi tidak memperhatikan kejadian-kejadian yang unik yang dialami oleh seseorang atau segolongan. Untuk menulis sebuah sejarah lisan, selain ketepatan, kejelasan dan keterangan, sejarah lisan juga dilakukan dengan cermat sehingga dapat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah.¹⁸ Oleh sebab itu penulis melakukan pengumpulan sumber lisan dengan melakukan teknik wawancara terhadap beberapa orang yang dianggap mempunyai beragam informasi yang dapat melengkapi sumber tulisan, seperti Alfian Noor anak dari Rosmiani Achmad, Muhammad Ridwan Alimuddin yang pernah mewawancarai Rosmiani Achmad serta masih memiliki rekaman suara dari Rosmiani Achmad dan beberapa narasumber lainnya

¹⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2020), hlm. 66.

¹⁸ Kuntowijoyo *op.cit.*, hlm. 27.

3. Verifikasi (kritik sejarah)

Tahap ini penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh, apakah sumber tersebut relevan untuk digunakan atau tidak dalam penelitian ini. Penggunaan sumber sejarah, oleh seorang peneliti harus memperhatikan keaslian sumber. Dalam tahapan kritik sumber terdiri dari kritik intern dan ekstern. Dalam mengkritik sumber, peneliti perlu menyeleksi sumber yang telah didapat apakah sumber tersebut sudah asli dan memiliki hubungan dengan apa yang sedang diteliti. Dalam sejarah lisan sendiri setelah melakukan wawancara penulis harus menyalin dan menyunting kembali sumber wawancara yang telah di dapat.¹⁹

4. Interpretasi (penafsiran)

Interpretasi atau penafsiran yaitu menafsirkan kembali terhadap sumber-sumber yang ada dan memahaminya sebelum melakukan penulisan sejarah. Dalam tahapan ini penulis berupaya untuk mencari keterkaitan antara fakta yang telah ditemukan, baik dari sumber buku, surat kabar, arsip, majalah maupun dari hasil wawancara, sehingga dapat dirangkai menjadi suatu peristiwa sejarah.

5. Penulisan Sejarah

Tahapan terakhir dari penulisan sejarah, pada tahap ini penulis menuangkan fakta yang telah ditafsirkan secara tertulis, dimana setelah melalui proses kritik sumber dan interpretasi data, sehingga dapat dirangkai dengan memenuhi aturan-aturan penulisan sejarah dan disusun secara kronologis.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29

1.7 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran sesuai yang diteliti, maka perlu adanya pembahasan dalam setiap bab. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang berkaitan.

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis.

Bab 2 Mengenai Lingkungan politik Rosmiani Achmad dan latar belakang kehidupan Rosmiani Achmad.

Bab 3 Mengenai kiprah Rosmiani Achmad di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Makassar Tahun 1961-1969

Bab 4 Membahas Kiprah Rosmiani Achmad sesudah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Makassar Tahun 1971-2004

Bab 5 Simpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi jawaban dari segala permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah

BAB II

KEHIDUPAN ROSMIANI ACHMAD

2.1 Latar Belakang Kehidupan Rosmiani Achmad

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu membahas tentang kehidupan Rosmiani Achmad, mengapa bisa terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi apa yang diikuti. Selain itu untuk mengetahui lukisan zaman Rosmiani Achmad saat aktif dalam kegiatan politik maka penulis menjelaskan mengenai kondisi politik di Sulawesi Selatan terkhususnya di daerah Makassar pada kurun waktu tahun 1950-2004. Dalam bab ini, nantinya akan dibagi menjadi tiga periode, adapun pada sub bab pertama membahas mengenai masa pemerintahan Orde Lama tahun 1950-1965, sub kedua masa Orde Baru 1966-1998 dan masa Reformasi 1998-2004.

2.1.1 Masa Kecil Hingga Menempuh Pendidikan

Rosmiani Achmad atau semasa kecil di panggil dengan Rosmiani Ongan, nama Ongan diambil dari kata tongan yang artinya benar, harus bersikap benar tutur kata dan perilaku. Sesuai dengan arti namanya Rosmiani disebut sebagai orang “Malaqbi” (panutan) bagi orang Mandar.¹

Rosmiani merupakan keturunan bangsawan dari kedua orangtuanya. Ayahnya bernama Halida Daeng Tuani yang berasal dari keluarga besar Rannuan Dgna Randeng dengan mendapat gelar besar bangsawan Mandar “Maradina Taramanu” Ibunya bernama Hj. Rialangi Puaq Silipoi anak dari Puatta Malunda, keturunan dari bangsawan adat Sandana. Ayah dari Rosmiani Ongan merupakan

¹ Wawancara bersama Idham Khalid Bodi lewat via whatsapp Tanggal 25 Juni 2022

salah satu pendiri masjid di Sepang.² Dalam buku biografi Rosmiani Achmad hasil wawancara Haliadi dengan Rosmiani, menjelaskan bahwa Rosmiani memiliki saudara sebanyak sebelas orang yang terdiri dari tiga laki-laki dan delapan anak perempuan termasuk Rosmiani. Saudara laki-lakinya bernama Pagurisang, Halim Said dan Aco Manaf sedangkan saudara perempuannya bernama Samasili, Hadari, Widari, Yallo, Yulang, Asma.³

Rosmiani Ongan lahir pada 16 April 1932, di Desa Sepang Tinambung Polewali Mamasa. Rosmiani berasal dari keluarga petani dan pedagang kopra, di antara sebelas bersaudara hanya Rosmiani dan adiknya yang bernama Atjo Manaf yang mengenyam bangku pendidikan.⁴ Atjo Manaf berkuliah di kedokteran Universitas Hasanuddin, hal tersebut dikarenakan ibu beliau bersikeras memilih kedokteran agar nanti bisa merawatnya ketika sakit, hal itu terbukti bukan hanya ibunya yang diobati tetapi keluarganya serta menjadi kepala kedokteran di Mamuju (sekarang sudah pensiun).

Masa kecil Rosmiani dikenal sebagai anak yang pemberani, terbukti ketika ia diajak oleh Andi Depu untuk membagikan kartu merah putih, kepada orang-orang yang mau merdeka. Jika mereka memegang kartu merah putih berarti mereka mengaku dan berjuang untuk merdeka. Rosmiani Achmad mempunyai nama panggilan dari Andi Depu yaitu Cicciq Macapiila. Akibat keberaniannya membagikan kartu merah putih beliau di tegur oleh kerabatnya yang bernama

² Haliadi Saidi, *Kiprah Gender Perempuan Mandar Sebuah Buku Biografi*, (Makassar: yayasan Mitra Sains, 2002), hlm. 95

³ *Ibid*, hlm. 106

⁴ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

Daeng Tammauni katanya agar berhati-hati, dan jangan selalu pergi menyebarkan kartu merah putih nanti tertangkap. Hal itu ditanggapi Rosmiani Ongan dengan menjawab kegiatan ini bukan barang haram, hal ini diajarkan oleh Andi Depu.⁵ Mengenai latar belakang pendidikan Rosmiani, beliau menempuh pendidikan di sekolah rakyat *Vervolgschool* pada tahun 1944 yang terletak di Saleppa Majene.⁶ Beliau merupakan perempuan pertama dari kampungnya yang bersekolah. Jarak dari rumah Rosmiani ke sekolah cukup jauh yaitu dari Tinambung ke Saleppa, sehingga oleh ibunya dibelikan kendaraan berupa bendi. Selain untuk mengantarnya ke sekolah, bendi tersebut digunakan juga oleh ibunya untuk bekerja ke kebun. Ketika jemputan Rosmiani lambat menjemput, Rosmiani menunggu di rumah Hasanuddin orang tua dari Basri Hasanuddin (mantan Rektor Universitas Hasanuddin)⁷. Kedekatan antara keluarga Rosmiani dan Basri Hasanuddin terjalin baik sampai sekarang. Kadang Rosmiani juga memakai sepeda untuk berangkat ke sekolah bersama teman-temannya dan kadang sendiri. Meskipun pada saat itu Halim kakak Rosmiani tinggal di daerah Saleppa beliau memilih bolak balik Tinambung, karena sedari kecil ibunya menanamkan kepercayaan diri, Rosmiani harus bisa menolong diri sendiri tidak bergantung

⁵ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

⁶ Haliadi Saidi, *Op.cit*, hlm 110

⁷ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

pada orang lain. Itulah falsafah hidup yang selalu ditanamkan oleh sang ibu kepada anak-anaknya.⁸



Gambar 1: Foto Rosmiani Achmad (kelima dari kiri) bersama teman-temannya.
(Sumber: Muhammad Ridwan Alimudin)

2.1.2 Masa Dewasa Dan Mulai Bekerja

Rosmiani Ongan berasal dari keluarga besar dan sederhana oleh karena itu, mereka di didik untuk berusaha mandiri agar mampu meraih cita-citanya. Seperti yang diketahui, pada saat itu anak perempuan mengalami pembatasan dalam bersekolah atau tidak diperbolehkan menempuh pendidikan seperti anak laki-laki. Rialangi adalah panggilan dari ibunda Rosmiani, Rialangi mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan yang ada di daerah Majene tanpa adanya pembatasan.

⁸ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

Didikan orang tua Rosmiani Ongan memberi syarat agar dapat menyelesaikan mengaji AL-Qur'an baru setelah itu mengikuti sekolah rakyat *Vervolkschool* pada tahun 1944 di Majene Mandar. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Rosmiani Ongan melanjutkan pendidikan sekolah guru negeri (SGN) di Majene.⁹ Sebelum menikah Rosmiani pernah menjadi seorang guru sekolah rakyat Negeri di Majene pada tahun 1949 tetapi berhenti dikarenakan ingin dipindah tugaskan ke daerah lain saat itu beliau tidak ingin di pindah tugaskan dan memilih mundur, orangtuanya tidak memberi izin disebabkan sekolah tempat Rosmiani ingin dipindahkan berada di daerah Pamboang jarak antara kediaman orang tua Rosmiani sangat berjauhan. Pada saat itu Rosmiani diberi pilihan oleh Ubin salah satu *controller* di Majene apakah ingin tetap menjadi guru atau berhenti, beliau memilih berhenti dan aktif di berbagai organisasi.¹⁰ Satu kelebihan beliau, mampu berbahasa Belanda, hingga ia mendapat julukan dari teman-temannya yaitu "Nona Belanda".

2.1.3 Kehidupan Berumah Tangga

Menginjak usia 18 tahun, Rosmiani menikah dengan Nur Aini Achmad. Mereka melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1950, sehingga Rosmiani Ongan mengubah namanya menjadi Rosmiani Achmad mengikuti nama suaminya. Mereka dipertemukan dalam organisasi PSII, adapun daerah asal Nur Aini Achmad sama-sama dari Majene tepatnya dari daerah Pamboang. Nur Aini Achmad lahir pada tanggal 31 Desember 1925, beliau mempunyai latar belakang

⁹ Haliadi Saidi., *Op.cit.*, hlm. 110-111

¹⁰ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

pendidikan *Volkschool* kemudian melanjutkan pendidikannya di Diniyah School (sekolah menengah agama Islam) setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah menengah kemudian melanjutkan di *Kwek School* (sekolah Muallimin Muhammadiyah).¹¹

Sekolah lanjutan yang diikuti oleh Nur Aini Achmad yakni Ilmu administrasi negara fakultas sosial politik UNHAS setingkat diploma (D3) dan sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA). Dari kedua sekolah ini yang menentukan karir pekerjaannya. Dikarenakan latar pendidikan yang banyak bernuansa Islam, hal tersebut mempengaruhi jalan hidup dari Nur Aini Achmad beberapa organisasi perjuangan yang bernuansa Islambeliau bergabung didalamnya seperti organisasi muhammadiyah dan partai syarikat IslamIndonesia (PSII).

Nur Aini Achmad semasa muda pernah bekerja sebagai pedangang sarung Mandar, beliau pernah di penjara di Makassar bersama Andi Depu dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Nur Aini Achmad bergabung dalam organisasi kebangkitan rahasia Islam Muda (KRIS MUDA).

¹¹ Haliadi Saidi., *Op.cit*, hlm. 97-99

Ada dua jenis sekolah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda melihat status dan golongannya pada saat itu yaitu sekolah untuk murid yang asalnya kalangan biasa/umum dan sekolah yang diperuntukan kalangan bangsawan. Dalam hal ini sekolah untuk kalangan biasa dapat dibagi menjadi 2 yaitu *Volkschool* dan *vervolgschool*. *Volkschool* adalah sekolah yang dibuat di setiap desa dimana terdapat kepadatan penduduk, adapun masa pendidikan selama 3 tahun dan mengajarkan mengenai baca tulis, perhitungan dan membaca bahasa latin dengan bahasa melayu maupun bahasa daerah dengan aksara lontara. *Vervolgschool* merupakan sekolah lanjutan dari *Volksschool* masa pendidikan selama 2 tahun. Daerah mandar pada tahun 1907 telah ada sekolah rakyat *Volkschool* dan sekolah Bumi putera (*Inlandschool School*). Untuk sekolah Holland Inlandsche School (HIS) jika orang mandar ingin bersekolah di situ maka mereka harus ke Pare-Pare. lihat di Nusriawati, "Sejarah Perkembangan Pendidikan di Daerah Mandar 1905-1960" (Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin, Ilmu Sejarah, Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin 2003) hlm 39-41.

Pada awal kemerdekaan daerah Indonesia bagian timur diduduki oleh tentara Australia di bonceng dengan sekutu, sehingga daerah Indonesia Bagian Timur dalam waktu yang singkat dapat dikuasai oleh tentara NICA atau *Nederlands Indisch Leger*. Hal tersebut membuat para kalangan muda dan masyarakat luas bangkit dan menyusun kekuatan untuk melawan tentara NICA. Daerah Mandar di bentuk organisasi Kris Muda, para pemimpin Kris Muda melihat semangat para pemuda pejuang yang berapi-api sehingga para pemimpin Kris Muda berinisiatif untuk menyalurkan semangat para pemuda dengan mengusahakan mengirim mereka ke Jawa untuk berlatih. Pada tanggal 26 November 1946 setelah pengiriman para pemuda ke pulau Jawa pemerintah NICA mencium aksi tersebut sehingga tentara NICA mulai mengadakan penangkapan terhadap anggota pimpinan perjuangan yaitu dari organisasi Kris Muda.

Tentara NICA menangkap 2 orang yang masuk dalam unsur pimpinan Kris Muda yaitu Nur Aini Achmad dan Madawali di daerah Pamboang. Para tentara NICA yang masih ada di Daerah Majene yang mengadakan pembersihan, ketika mereka hendak meninggalkan Daerah Majene sebagian tawanan yang ada dalam tangsi (penjara) dan para pemimpin Kris Muda yang tertangkap turut serta di bawah oleh tentara NICA dan di angkut pada waktu tengah malam untuk di bawah ke Makassar. Adapun jumlah tahanan sebanyak 31 orang di antaranya Andi Depu, M. Riri Amind Daud, Abd. Rahman Tamma, Abdurrahman Haddad, Nur Aini Achmad dan lain sebagainya.

Pada Maret tahun 1947 mereka di angkut dengan menggunakan sebuah kendaraan truk besar menuju Makassar. Semua tahanan diikat satu persatu tanpa

membedakan perempuan atau laki-laki, setiba di Makassar mereka di bawah ke penjara *hoogpad* (Jl. Ahmad Yani). Beberapa bulan di penjara sebagian dari tawanan di bawah kelayangan kapasa termaksud Nur Aini Achmad, para tahanan yang ada di layangan kapasa merupakan para anggota pejuang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Beberapa bulan Nur Aini dan kawan-kawan ditahan di layang kapasa Makassar (sekarang kompleks angkatan Laut RI) pemeriksaan dilakukan berbulan-bulan oleh pihak penguasa NIT di bawah pimpinan Abdullah Dg. Mappuji. Berjalannya pemeriksaan sejalan dengan tercapainya persetujuan Linggarjati, dengan adanya persetujuan ini beberapa tahanan mendapat pembebasan sementara, tetapi masih berstatus sebagai tahanan kota.¹² Ketika dalam penjara Nur Aini Achmad ditawari oleh salah satu temannya yang sama-sama ditahan saat itu yang bernama Masiara yang berasal dari Makassar untuk bergabung membangun jawatan penerangan. Ketika mereka berada di penjara Marisa menyampaikan bahwa perjuangan harus juga ditekan dalam bidang penerangan. Kita harus menjelaskan kepada rakyat bagaimana sisi kemerdekaan yang harus dicapai, Mereka merupakan salah satu perintis Jawatan penerangan¹³

¹² Arsip pribadi Abdurrahman Haddad dalam skripsi Yogi Firman Mauliana, *Abdurrahman Haddad Biografi Seorang Pejuang Mandar 1922-1950*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2017) hlm. 71.

¹³Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.



Gambar 2. Foto piagam penghargaan Nur aini Achmad. Foto di sebelah kiri surat tanda jasa pahlawan, foto sebelah kanan medali perjuangan angkatan-45.
(sumber: Muhammad Ridwan Alimudin)

Setelah memutuskan untuk berkeluarga, Nur Aini Achmad bersama Rosmiani memilih pindah dari Majene ke daerah Makassar pada bulan April 1956. Saat itu Rosmiani sedang mengandung anak kedua, salah satu alasannya mereka untuk pindah yaitu, ingin meninggalkan perilaku feodal yang sangat ketat. Anak pertama Rosmiani Achmad yaitu Alfian Noor semasa kecil tidak diizinkan untuk menginjak tanah atau pergi berjalan jauh setiap ingin pergi ketempat lain, dia selalu di gendong atau di tandu, penggendong selalu siap dan berganti-gantian karena jumlahnya yang banyak. Akibatnya betis anaknya menjadi kecil, setelah berdiskusi dengan suaminya Rosmiani memilih untuk pindah ke Makassar untuk masa depan anaknya, selain itu kondisi keamanan di Mandar tidak lagi kondusif, banyak rakyat Mandar yang memilih pindah ke daerah lain dikarenakan gerakan DI/TII yang merajalela di Mandar. Selain itu tidak dipungkiri pindahnya

Rosmiani dan suami ke Makassar untuk meniti karir, ketika memilih pindah, mereka masih menumpang dengan keluarganya yang berada di Makassar setelah itu mereka memiliki rumah di jalan Khairil Anwar yang dulunya digunakan menjadi sekretariat anak-anak Mandar.

Dari hasil pernikahan antara Rosmiani Achmad dan Nur Aini Achmad, mereka dikarunikan lima orang anak. Anak pertama lahir tahun 1951 bernama Alfian Noor salah satu guru besar di Universitas Hasanuddin jurusan kimia, anak kedua bernama budiati Noor alumnus Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lahir tahun 1956 anak ketiga bernama chairin Nur yang fokus dalam bidang pertanian dan merupakan alumnus Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin lahir tahun 1963, anak keempat lahir pada tahun 1965 bernama Darfina Nur merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Newcastle dan anak kelima lahir tahun 1969 yang bernama Emilsyah Nur. Mereka juga memiliki anak asuh yang mereka didik sebagai bagian dari keluarganya yang berjumlah 55 orang anak. Rosmiani menghabiskan masa tuanya di kediamannya yang berada di Jl. Pelita Raya IV.¹⁴

Dari kelima anaknya tidak ada satupun yang mengikuti jejak Rosmiani yang aktif dalam bidang politik. Menurut Alfian Noor selaku anak dari Rosmiani Achmad ibunya selalu memberi anaknya pilihan untuk memilih apa yang ia sukai. Prioritas dari Rosmiani Achmad adalah pendidikan, sehingga semua anaknya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sesuai dengan minat yang

¹⁴ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

mereka sukai.¹⁵ Bisa dikatakan dalam hal mendidik anak Rosmiani Achmad berhasil, sikap tegas dan mempunyai prinsip yang ditanamkan sejak awal serta rasa percaya membawah keberhasilan kepada anak-anaknya dalam pendidikan.¹⁶ Beliau berpendapat bahwa bagaimanapun darah birunya seseorang kalau tidak memiliki pendidikan sama saja dengan biawak, bahwa seseorang jika tidak memiliki pendidikan mau jadi apa. Beliau sangat tidak menyukai sikap feodal yang ada di kampung halamannya.¹⁷

Mengenai masalah mendidik anak Rosmiani Achmad menerapkan prinsip bekalilah anak-anakmu dengan ilmu agama, kemudian lepaslah mereka kemana mereka mau.¹⁸ Di lihat dari keberhasilan Rosmiani Achmad dalam mendidik anak tidak terlepas dari dorongan dan kepercayaan yang diberikan oleh sang suami. Begitupun dalam organisasi yang selama ini Rosmiani ikuti baik organisasi sosial maupun politik, sang suami Nur aini Achmad selalu memberi dukungan dan tidak melarang.¹⁹ Selain itu Rosmiani merupakan pribadi yang dikenal tegas, ketegasannya terlihat dari didikan dan saran yang diberikan kepada keluarga dan organisasi yang beliau ikuti. Kebanyakan dari organisasi yang beliau ikuti mempunyai posisi sebagai ketua, wakil ketua, bendahara serta koordinator.

¹⁵ Wawancara, Alfian Noor. Universitas Hasanuddin lab departemen Kimia fmipa. 12 Juni 2021

¹⁶ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.
2021

¹⁷ Wawancara, Idham Khalid Bodi. Via Whatsapp. 27 Juni 2022

¹⁸ Dalam buku: ibu teladan, sebuah citra (Jakarta: BP4 DEPAG 1993), hlm. 54-55

¹⁹ Wawancara, Alfian Noor. Universitas Hasanuddin lab departemen Kimia fmipa. 12 Juni 2021.

Dalam diri Rosmiani Achmad ada nilai budaya Mandar yang selalu dipegang yaitu *sibaliparri*. Menurutnya *sibaliparriq* merupakan budaya kerjasama, antara laki-laki dan perempuan. Perempuan Mandar merasa malu menganggur, kalau pekerjaan suaminya nelayan, tugas seorang istri menjual hasil tangkapan suaminya ke pasar, sehingga terciptalah keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai harga diri perempuan Mandar dari dulu sudah melekat.²⁰



Gambar 3. Foto Rosmiani Achmad dan anak-anaknya.
(Sumber: Muhammad Ridwan Alimudin)

Begitu pun dalam membina keluarga antara Rosmiani dan suami saling membagi peran, prinsip-prinsip kebudayaan *sibaliparri* selalu diterapkan dalam keluarga ini baik dalam mendidik anak maupun dalam unsur pekerjaan. *Sibaliparri* memiliki arti yaitu saling membantu meringankan beban dalam bentuk gotong royong,

²⁰ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

kerjasama antara satu keluarga, mitra sejajar antara suami istri²¹ sehingga hal yang wajar ketika beliau mendapat penghargaan sebagai ibu teladan pada tanggal 31 Oktober 1985 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang di gelar di Ujung Pandang kegiatan ini di pelopori oleh BP4 atau badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian.²² Pada tanggal 3 Januari 1986 Rosmiani kembali meraih penghargaan sebagai ibu teladan pada tingkat nasional dan mendapat penghargaan sebagai pemenang kedua.²³

2.2 Pengalaman Organisasi Pada Masa Remaja Hingga Dewasa

Perjalanan organisasi Rosmiani diawali ketika ia masih di bangku sekolah pada tahun 1946-1948, beliau aktif dalam organisasi persatuan Pelajar Indonesia Mandar (PERPIM) sebagai bendahara, ketika berusia 14 tahun beliau pertama kali memasuki organisasi yang dikelola bersama kawannya semasa bersekolah. Ketika itu beliau bersekolah di sekolah keguruan negeri Majene. Organisasi ini mendapat dukungan dari para guru-guru dan masyarakat, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan keorganisasian dan kemasyarakatan.²⁴

Kemudian Rosmiani juga aktif dalam organisasi Kebangsaan Wanita Indonesia Mandar (KWI) di Majene pada tahun 1948-1950. Organisasi ini bertujuan untuk membangun dan memajukan perempuan Mandar, dalam

²¹ Mahyuddin, dkk, "keluarga Nelayan dan Budaya Siballipari: menyikapi relasi kesetaraan gender dalam masyarakat Mandar", *Al-Maiyyah*, Vol.13 No 1 (Juni 2020), hlm. 79-80.

²² BP4 adalah sebuah lembaga konsultan yang bersifat profesi yang melaksanakan tugas dan rekan kerja Kementerian Agama (KEMENAG). Salah tugasnya yaitu membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan. Fitrotinn Jamilah, "Peranan (BP4) dalam membina keluarga sakinah dan menyelesaikan penyelesaian perkawinan Islam", *Al-Fikrah* Vol 2 No. 1, (Juni 2019), hlm.51.

²³ Haliadi Saidi., *Op, cit*, hlm. 122-123.

²⁴ *ibid.*, hlm. 45.

organisasi itu Rosmiani sebagai ketua yang di tunjuk langsung tanpa pemilihan suara oleh anggota organisasi KWI.²⁵ Para anggota organisasi tersebut, memberi kepercayaan kepada Rosmiani untuk menjadi pemimpin. Dikarenakan pada saat itu di daerah Mandar masih dalam masa perjuangan, sehingga organisasi ini sedikit banyak di pengaruhi unsur-unsur perjuangan. Adapun organisasi Kebangunan Wanita Indonesia Mandar (KWI) berkembang di berbagai kecamatan-kecamatan seperti di daerah Polman, Majene, dan Mandar. Dalam berbagai kegiatannya organisasi ini mendapat dukungan dari para tentara, organisasi ini juga mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kepandaian Putri di Majene sekolah ini bersifat kejurusan yang tujuan dari sekolah ini untuk memajukan puteri Mandar baik dalam hal ilmu pengetahuan, dan berbagai kursus-kursus seperti menjahit. Sekolah ini diresmikan oleh Andi Pangerang Pettarani.²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 46-47

²⁶*Ibid.*, hlm. 48



Gambar 4: Foto Sekolah Kepandaian Puteri. S.K.P Madjene
(sumber: Muhammad Ridwan Alimudin)

Aktif dalam organisasi KWI membawah beliau memasuki dunia politik, semasa aktif di organisasi KWI Rosmiani di pilih sebagai utusan organisasi dalam pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) di Makassar. Organisasi ini kemudian bergabung kedalam Badan Perjuangan Nasional (BAPNA) yang di pimpin oleh Wahab Anas yang di bentuk pada tahun 1948. Aktif dalam keorganisasian semakin membentuk jati diri Rosmiani, seperti yang di kutip dalam buku *Kiprah Gender Perempuan Mandar*, salah satu tokoh Budayawan Mandar Husni Djamaluddin bercerita bahwa ia masih mengingat Rosmiani berpidato dengan semangat berapi-api di depan rapat akbar rakyat Mandar sekaligus penjemputan Andi Depu dari Makassar ke Tinambung Mandar, walaupun waktu itu usia beliau masih belasan tahun.

Sejalan dengan itu Rosmiani Achmad tidak hanya bergabung dalam organisasi kemasyarakatan tetapi organisasi politik yang berdasarkan Islam. Pada saat itu di Daerah Mandar hanya ada organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) satu-satunya partai Islam, Partai Masyumi belum ada itu sebabnya banyak orang yang bergabung di partai PSII.²⁷ Ketika bergabung dalam organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia Rosmiani aktif dalam organisasi sayapnya, gerakan wanita PSII yang memiliki cabang di Majene saat itu beliau menjadi ketua, Rosmiani aktif mulai dari tahun awal 1950-an dalam organisasi inilah beliau bertemu dengan sang suami. Ketika beliau dan suami pindah ke daerah Makassar, beliau masih aktif dalam gerakan wanita PSII (GERWAPSI) tahun 1958. Aktif dalam organisasi ini menjadi modal untuk Rosmiani masuk dalam rana dunia politik untuk tahun-tahun berikutnya.²⁸

Semasa aktif dalam organisasi ini Rosmiani pernah dipercayakan menjadi utusan kongres PSII yang dilaksanakan di Jakarta tahun 1962. Rosmiani di percaya untuk membacakan deklarasi Cokroaminoto di depan Bung Karno saat itu beliau merupakan utusan dari GERWAPSI dari Makassar. Pada tahun 1964 Rosmiani juga ikut sebagai perwakilan pada kongres PSII yang berlangsung di Bandung. Selama bergabung dalam GERWAPSI Rosmiani Achmad membangun

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49

²⁸ *Ibid.*, hlm. 49-50

keakraban dengan tokoh-tokoh terkemuka PSII seperti Harsono Cokroaminoto, Anwar Cokroaminoto.²⁹

keaktifan Rosmiani Achmad dalam GERWAPSI menjadi salah satu cikal bakal beliau dapat terangkat menjadi anggota DPRD-GR Kotapraja Makassar dari perwakilan Golongan Wanita. Adapun keaktifan dan keterlibatan Rosmiani Achmad di DPRD akan dijelaskan pada bab berikutnya.



Gambar: Foto Rosmiani Achmad (tengah) saat tampil di acara PSII.
Sumber: (Muhammad Ridwan Alimudin)

2.3 Lingkungan Politik Rosmiani Achmad

2.3.1 Masa Orde Lama 1950-1965

Sulawesi bagian Selatan pada pertengahan tahun 1950 mengalami masa yang rumit. Pada tahun itu terjadi pembubaran Negara Indonesia Timur yang masa pemerintahannya dari tahun 1946. Pada tanggal 15 Agustus 1950, di Jakarta Presiden Soekarno membacakan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saat bersamaan Republik Indonesia Serikat

²⁹ Transkrip video hasil wawancara Muhammad Ridwan Alimudin bersama Rosmiani Achmad 3 Februari 2015. Terimakasih kepada Muhammad Ridwan Alimudin untuk membagi hasil wawancara dengan penulis.

dinyatakan dibubarkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat³⁰. Awal terbentuknya NKRI banyak permasalahan yang timbul seperti terjadinya gerilya dan masalah desentralisasi kekuasaan.³¹ Pemerintah pusat dituntut untuk melakukan penataan pemerintahan dengan memberi kekuasaan penuh pada pemerintah daerah. Namun desentralisasi sangat sulit diterapkan di Indonesia Bagian Timur yang merupakan wilayah bekas kekuasaan NIT yang tidak mengenal daerah provinsi otonom, akibatnya pada saat dibentuknya daerah Provinsi Sulawesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950.³² Maka daerah pemerintah di tingkat bawah disebut sebagai kabupaten atau dalam Undang-Undang kelak disebut sebagai daerah Tingkat II. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saat itu belum dibentuk dan mulai dibentuk pada tahun 1960.

Tanggal 4 Juli 1951 pemerintah pusat mengangkat Sudiro sebagai Gubernur menggantikan B.W. Lopian. Proses pengangkatan Gubernur pada saat itu dilakukan atas usulan Menteri Dalam Negeri. Setelah calon yang diusulkan mendapat persetujuan melalui sidang kabinet, selanjutnya calon diangkat oleh Presiden.

³⁰ Pemda TK. I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah I Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Pemda TK. I Sulawesi Selatan, 1991), hlm. 319.

³¹ Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada pemerintahan daerah atau penyerahan wewenang pimpinan kepada bawahan. Fitri Febriati Safitri, "Pemerintah Ahmad Dara Sjahrudin Sebagai Walikota Makassar 1952-1956" (Makassar: Skripsi, Ilmu Sejarah, ilmu Budaya Universitas Hasanuddin), hlm. 27-28.

³² Daerah Republik Indonesia serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda kecil.

Pada tanggal 6 September 1951 dilakukan penyusunan ulang pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 56 Tahun 1951 tentang pembekuan Dewan Kota dan Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan yang ada sejak masa NIT (anggota dewan yang ditunjuk pada tahun 1947). Tanggal 3 Februari 1952 dilakukan pemilihan Dewan Kota yang didahului dengan pendaftaran calon pemilih oleh kepala kampung setiap daerah dengan syarat calon pemilih adalah mereka yang telah tinggal di Makassar selama 6 bulan. Proses pemilihan ini merupakan pertama kali dilakukan di Sulawesi.³³ Walaupun sebelumnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Sulawesi sudah melaksanakan pemilihan Dewan Kota Makassar tetapi cara pemilihannya dilakukan bertingkat atau dilakukan oleh suatu badan khusus yang lebih tinggi tingkatannya dari Dewan Kota seperti Dewan Provinsi.³⁴ Beberapa partai yang berhasil mendudukkan calonnya, yaitu Masyumi, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik,³⁵ adapun anggota yang ditunjuk oleh partai atas dasar persetujuan. Meskipun Gubernur Sulawesi tahun 1950-an tidak dipegang oleh Partai Masyumi, tetapi patut untuk diketahui bahwa jabatan-jabatan birokrasi sipil pada tingkat Kabupaten di Sulawesi, partai ini cukup diperhitungkan.³⁶

³³ Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar AkkaseTeng, Heri Kusuma Tarupay (penyunting), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm.19

³⁴ Mita Puspita, "Dewan Kota Makassar (*Gemeenteraad Van Makassar*)" (Makassar: skripsi, Ilmu Sejarah, ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 41-43.

³⁵ Dias Pradadimara "Kronika Sulawesi Selatan di tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar AkkaseTeng, Heri Kusuma Tarupay (penyunting), *op.cit.*, hlm. 20

³⁶ Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal Dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar

Tanggal 24 November 1953 di lakukan pengangkatan Gubernur dari Sudiro kepada pelaksanaan tugas sementara yaitu Winaro dikarenakan Gubernur Lanto Dg. Pasewang yang di angkat sebagai Gubernur masih dalam keadaan sakit. Baru di tahun 1954 pimpinan pemerintahan Provinsi Sulawesi sudah di tangani oleh Gubernur Sulawesi Lanto Dg. Pasewang. Dalam masa jabatan Lanto Dg. Pasewang kegiatan di bidang pemerintahan berlangsung sebagaimana biasanya. Pada Tahun ini, untuk anggota Dewan Kota Makassar tidak di lakukan pemilihan. Adapun masa jabatan dari Lanto Dg. Pasewang berakhir pada tahun 1956. Pada tahun yang sama tanggal 12 Juni 1956 Pangerang Petta Rani diangkat sebagai Gubernur Sulawesi. Pada masa pemerintahannya banyak hal penting yang terjadi di bidang pemerintahan antara lain menyangkut soal daerah-daerah otonom yang sudah ada dalam lingkungan Sulawesi. Pembagian wilayah yang di lakukan oleh pemerintah pusat di lakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang pembubaran daerah Makassar (yang termasuk daerah Makassar pada tahun ini meliputi Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, dan Pangkajene Kepulauan) dan pembentukan Daerah Makassar, Gowa, dan daerah Jeneponto-Takalar, begitupun Daerah Luwu dan Daerah Bone terjadi pemekaran wilayah. Pemerintah Daerah Makassar sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif disebabkan terjadinya pertentangan politik yang menghendaki Gowa sebagai salah satu daerah kekuasaan Makassar dibentuk menjadi daerah otonom tersendiri. Adapun nantinya

AkkaseTeng, Heri Kusuma Tarupay (penyunting), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. (Yogyakarta: Kanisius,2014) *ibid.*, hlm. 160.

kedudukan pemerintahan Gowa berada di Sungguminasa dan Daerah Makassar kedudukan pemerintahannya di Pangkajene Kepulauan. Selain itu, pada tahun 1957 terjadi suatu peristiwa penting dalam lingkungan Provinsi Sulawesi yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Permesta. Sebelumnya di wilayah Sulawesi telah terjadi pemberontakan pasukan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mengganggu berjalannya pemerintah dan keamanan. DI/TII berakhir pada tahun 1965.

Adapun situasi politik di pusat pada tahun 1957 yaitu Presiden Soekarno mulai membentuk lembaga-lembaga mampu menerapkan konsep pemerintahan yang di inginkan yakni Demokrasi Terpimpin karena Demokrasi Liberal di anggap tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Demokrasi terpimpin baru di sepakati untuk dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 1959 dalam sidang Kabinet Karya dengan kesempatan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya itu Soekarno mengusulkan mengenai gagasan mengenai adanya Kabinet Gotong Royong yang mewakili semua partai atau fraksi di dalam parlemen dan mengusulkan adanya Dewan Nasional yang meliputi segenap bangsa Indonesia dengan tidak memandang dari mana golongannya “Golongan fungsional”.³⁷ Soekarno mengatakan bahwa Gotong Royong menjadi ciri khas dari rakyat Indonesia dan lembaga sosial yang ada di Indonesia. Dengan prinsip negara Gotong Royong, maka tidak ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, kelompok atau apapun yang memperjuangkan kehendak sendiri. Pada periode

³⁷ Abd. Rachman Halim Ad. “Haluan Partai Politik Indonesia dalam Kebijakan Terhadap Irian Barat 1958-1962” (Makassar: Skripsi, Ilmu Sejarah, Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin 2020), hlm 56

Demokrasi Terpimpin Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah Kabinet Gotong Royong.³⁸ Pada tanggal 5 Juni 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi mengenai pembubaran Konstituante kembalinya UUD 1945. Melalui dekrit Presiden sebagai sarana konstitusional untuk membangun sistem politik yang berdasarkan pada perwakilan fungsional dan pembentukan Kabinet Gotong Royong yang nantinya mewakili semua partai.

Sejalan dengan itu di lakukan pembentukan daerah tingkat II pada Daerah Sulawesi sesuai Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi tanggal 4 Juni 1959. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintahan yang berkaitan dengan wilayah Sulawesi dan Undang-Undang yang membahas mengenai pembentukan daerah swatantra di Sulawesi dan pembubaran daerah swapraja. Sebenarnya wacana penghapusan sudah ada sejak tahun 1950 an, karena dianggap tidak sesuai dengan tatanan pemerintahan baru. Meskipun di awal penghapusan daerah Swapraja mendapat penolakan dari sebagian anggota elit tradisional perihal penghapusan daerah swapraja tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Meski disepakati pimpinan Swapraja yang terakhir di alihkan menjadi Bupati yang pertama.³⁹ Setelah dihapuskannya daerah Swapraja dan terbentuknya daerah tingkat II/Kotapraja, Daerah Makassar disebut sebagai Kotapraja Makassar. Pada

³⁸ David Reeve, *Golkar Sejarah yang hilang akar pemikiran & dinamika* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 127

³⁹ Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, M. Bahar AkkaseTeng, Heri Kusuma Tarupay (penyunting), *op.cit.*, hlm. 25-26.

Daerah Swapraja adalah salah satu bentuk pemerintahan pada masa kolonial yang mencakup berbagai bentuk administrasi, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian. Daerah swapraja berarti daerah yang dipimpin oleh pribumi dan berhak mengatur urusannya sendiri.

saat itu belum terbentuk daerah tingkat I Sulawesi Selatan atau daerah setingkat lebih di atas.

Memasuki tahun 1960 struktur pemerintahan Daerah Sulawesi mengalami perubahan, pada tahun itu terbentuk Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 31 Maret 1960. Selain itu yang jabatan sebagai kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara adalah A.A Rivai dari kalangan militer dan pada tanggal 6 Februari tahun 1960 jabatan sebagai Walikota Makassar di jabat oleh Aroepala. Menjelang tahun 1961 dalam mewujudkan pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 tentang pembentukan dan pelantikan DPRD-GR, melalui panitia pemilihan calon DPRD-GR yang di bentuk dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara tanggal 15 November 1960 Nomor 1641. Mengenai jumlah DPRD-GR tingkat II Kotapraja Makassar yang di lantik pada saat permulaan penyusunan sebanyak 35 orang di antaranya N.U sebanyak 6 kursi, PSII 3 kursi, Parkido 3 kursi, PNI 1 kursi, Katolik 1 kursi, PKR 1 kursi, dan Golkar 20 kursi.⁴⁰

Dampak dari dikeluarkannya dekrit Presiden membuat Undang-Undang yang berlaku mengalami penyesuaian dengan sistem pemerintahan negara yang dianut oleh karena itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan mengalami perubahan, sehingga dikeluarkan Penetapan Presiden

⁴⁰ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 726 surat-surat tanggal 9 April-10 desember 1970 tentang peremajaan anggota-anggota DPRD daerah Makassar. Dalam arsip ini terdapat daftar anggota DPRD-GR tahun 1961-1969.

No 5 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah tetapi mengalami penyempurnaan pada tanggal 10 Februari 1961.⁴¹ Dalam penetapan Presiden di atur mengenai jumlah DPRD Sulawesi Selatan Tenggara, yang menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah mengusahakan DPRD-GR di semua Daerah tingkat I dan Tingkat II yang terdiri atas wakil-wakil dari golongan politik dan wakil dari Golongan Karya, berdasarkan pembagian yang sama bagi masing-masing golongan, jika jumlah anggota DPRD-GR bilangan tidak genap maka isi oleh Golongan Karya.

Sistem pengangkatan anggota DPRD-GR di atur dalam Penetapan Presiden No 5 tahun 1960 bahwa kepala daerah mengajukan kepada instansi-instansi di atasnya mengenai nama calon-calon yang akan di angkat sebagai anggota DPRD-GR. Dalam hal jumlah anggota DPRD-GR yang diusulkan harus dua kali dari jumlah yang di perlukan, sehingga penulis menyimpulkan bahwa yang melaksanakan pengangkatan untuk DPRD-GR TK II ialah Gubernur atas usulan kepala daerah yang atas ini untuk wilayah TK II ialah Walikota. Anggota yang di usulkan merupakan anggota partai dan Golongan Karya yang diakui, masing-masing dari partai dan golongan menyerahkan nama anggota yang diusulkan kepada Walikota. Pada masa itu Rosmiani Achmad di angkat sebagai anggota DPRD-GR Kotapraja Makassar yang diusulkan oleh Golongan Wanita. Pada tanggal 4 Januari 1961 anggota DPRD-GR tingkat II Kotapraja Makassar melaksanakan pelantikan. Adapun susunan DPRD-GR, yaitu anggota-anggota

⁴¹ Pemda TK. I Sulawesi Selatan, *op. cit.*, hlm .413

Yang dimaksud dengan instansi di atasnya ialah menteri dalam negeri dan otonomi daerah untuk daerah tingkat I dan untuk daerah tingkat II instansi di atasnya adalah kepala daerah tingkat I.

DPRD-GR terdiri atas unsur-unsur partai politik dan unsur-unsur Golongan Karya.⁴² Perlu di ketahui bahwa mulai tahun 1960 hingga tahun 1969 tidak ada pemilihan langsung hanya pengangkatan anggota DPRD-GR.

Pada masa pemerintahan A.A Rivai wilayah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara mengalami perubahan wilayah, yaitu terjadi pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara di bagi atas dua bagian yakni Provinsi tingkat I Sulawesi Selatan dan provinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Terbentuknya daerah tingkat I mengakibatkan terjadinya pembagian wilayah negara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor.18 tahun 1965. Wilayah RI di setiap provinsi di bagi ke dalam tiga tingkatan, yakni provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat I, kabupaten dan kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan atau kotapraja sebagai daerah tingkat III. Aturan ini berlaku untuk semua Wilayah Indonesia sehingga aturan ini membuat Kotapraja Makassar berubah menjadi kotamadya.⁴³ Aturan ini mengakibatkan peraturan sebelumnya tentang pokok-pokok pemerintah⁴⁴ tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 juga mengatur mengenai susunan pemerintah daerah termasuk DPRD-GR, dimana jumlah anggota DPRD-GR ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga pada tahun 1966 kursi untuk anggota DPRD-GR TK II mengalami penambahan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 485

⁴³ *Ibid.*, hlm. 476

⁴⁴ UU No 1 Tahun 1957, PENPRES No 6 Tahun 1960 yang disempurnakan dan PENPRES No. 5 Tahun 1960 yang disempurnakan.

2.3.2 Masa Orde Baru 1965-1998

Banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965, pada tahun itu terjadi gerakan kudeta yang banyak anggapan mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia dalang dari semua ini sehingga terjadi penumpasan orang-orang yang di anggap Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya. Begitupun di Daerah Sulawesi Selatan peristiwa tersebut berdampak pada sistem pemerintahan sehingga terjadi perombakan anggota dalam bidang pemerintah dan tidak terlepas di DPRD-GR tingkat II Kotamadya Makassar. Pada tanggal 11 Maret 1966 Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya dinyatakan sebagai partai terlarang dan segala kegiatannya di larang dalam wilayah Negara Indonesia serta segala kursinya di DPRD Tingkat I dan tingkat II dinyatakan kosong dan digantikan dengan organisasi fungsional atau dari Golongan Karya.

Tabel 1: Jumlah Anggota DPRD-GR Makassar Tahun 1961/1971

ON	TAHUN	POLITIK	KARYA	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH KURSI	KURSI LOWONG
1	1961	15	20	35	35	
2	1962	15	20	35	35	
3	1963	15	20	35	35	
4	1964	15	20	35	35	
5	1965	15	17	32	35	2 PKI, 1 Veteran
6	1966	19	20	39	40	1 PNI
7	1967	19	20	39	40	1 PNI
8	1968	19	20	39	40	1 PNI

9	1969	21	16	37	40	2 Karya+1 PNI
10	1970	20	17	37	40	2 Karya 1 PNI
11	1971	19	17	36	40	2 politik, 2 Karya

Sumber: Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 727
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar: berita acara tanggal 29
Juni 1965 tentang anggota-anggota DPRD yang baru.

Pada periode 1961-1969 anggota DPRD-GR beberapa kali mengalami pergantian anggotanya, adapun jumlah anggota DPRD-GR tingkat II yang berasal dari Partai Komunis sebanyak 2 orang diantaranya Ali Abd. Samarang dan Marsam Samir. keduanya dihentikan sementara pada 20 oktober 1965⁴⁵ setelah adanya aturan mengenai larangan berkegiatan orang-orang dari kalangan komunis, barulah keduanya dihentikan secara hormat pada tahun 1966. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan anggota DPRD-GR dan susunan pemerintahan baik tingkat I maupun Tingkat II. Anggota DPRD-GR yang mengisi kekosongan kursi dari anggota sebelumnya hanya melanjutkan masa atau sisa dari anggota yang digantikan. Dari pelantikan pada tahun 1961 hingga pada tahun 1969 untuk anggota DPRD-GR tingkat II Kotamadya Makassar beberapa kali terjadi pergantian anggota dan ada yang bertahan melebihi 5 tahun dari masa jabatannya. Pada tahun yang sama berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri maka pada hari kamis 13 Oktober 1966 dilaksanakan serah terima jabatan pemerintah atas daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tangan Kolonial A.A Rivai

⁴⁵ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 725 mengenai surat-surat 30 Agustus 1963-21 April 1980 tentang pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili partai politik yang diakui dan partai politik yang tidak diakui.

ke pada Letnan Kolonel Achmad Lamo berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD-GR provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya DPRD provinsi memilih Achmad Lamo kembali dengan surat keputusan 29 November 1972 No. 75/M/tahun 1972 dan di lantik pada 22 Juni 1973 dan berakhir pada 22 Juni 1978,⁴⁶ sedangkan yang menjabat sebagai Walikota yakni H. M. Daeng Patompo yang masa jabatannya dimulai 1965 dan berakhir 1978.

Pada tahun 1965 setelah terjadinya kekacauan di Indonesia, MPRS mengeluarkan ketetapan No.XXXIII/MPRS/1967 bahwa Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto. Pada bulan Maret 1968 MPRS, memilih Soeharto sebagai Presiden. Pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Masa Orde Baru yang mana kekuasaan militer lebih dominan. Pada tahun 1968, 17 dari 25 provinsi di perintah oleh perwira militer tidak kecuali wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1969 kebanyakan Bupati dan Walikota di Indonesia dijabat oleh orang-orang militer, seperti Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Achmad Lamo dan Walikota Makassar H. M. Daeng Patompo yang keduanya merupakan dari kalangan militer.

Memasuki tahun 1968 diadakan penyempurnaan wakil-wakil dari unsur Golongan Karya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1968 tentang pemurnian wakil Golongan Karya dalam keanggotaan DPRD-GR baik di tingkat I maupun di Tingkat II dalam instruksi di atur mengenai anggota-anggota yang menduduki jabatan DPRD-GR, bahwa anggota DPRD-GR di

⁴⁶ Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik dan Bupati Maros Letnan Kolonel Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol IX, 2 Oktober 2011, hlm.81

tingkat provinsi, kabupaten dan kotamadya terdiri atas wakil-wakil dari partai politik dan Golongan Karya. Berdasarkan pembagian jumlah wakil yang sama bagi masing-masing golongan, jika anggota DPRD-GR berjumlah tidak genap maka wakil dari Golongan Karya yang mengisi kursi tersebut. Anggota-anggota DPRD-GR yang berasal dari Golongan Karya yang berafiliasi atau bekerjasama dengan partai politik lainnya akan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh Gubernur kepala daerah bagi daerah tingkat II. Adapun anggota DPRD-GR TK II Kotamadya Makassar yang diberhentikan karena usulan pemurnian yaitu Muh Salim dari Wakil Golongan Cendekiawan/Pendidikan, Ir.Andi Ronda Wakil Golongan Tani, Mungkasa Dg. Paduni wakil Golongan Pengusaha Nasional, dan A.J Lomtoh, B.A wakil Golongan Ulama Kristen.⁴⁷ Tanggal 14 Maret 1968 mengenai peremajaan anggota DPRD-GR yang melebihi masa jabatan 5 tahun untuk setiap anggota dewan yang masuk dalam kriteria tersebut diberhentikan secara hormat.⁴⁸

Memasuki tahun 1970 pemerintah Orde Baru menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahan maupun dalam perpolitikan di Indonesia. Pada masa itu pemerintah ingin menata infrastruktur yang menjadi fokus utama, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang diharapkan pada tahun 1968 dapat terlaksana tapi nyatanya harus ditunda, pemilu baru dilaksanakan pada tahun

⁴⁷ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 725 mengenai surat-surat 30 Agustus 1963-21 April 1980 tentang pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewakili partai politik yang diakui dan partai politik yang tidak diakui.

⁴⁸ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 726 surat-surat tanggal 9 April-10 Desember 1970 tentang peremajaan anggota-anggota DPRD daerah Makassar.

1971. Adapun pegawai pemerintahan di atur mereka tidak dapat bergabung dengan partai politik kecuali Golongan Karya.⁴⁹

Pelaksanaan pemilu 1971, terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan di setiap daerah. Di Makassar dibentuk panitia pemilihan tanggal 12 Februari 1970, panitia ini akan mencatat jumlah pemilih dan syarat apa saja yang harus dilakukan. Setelah terjadinya pemberontakan G 30/S salah satu syarat peserta pemilu adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam “gerakan kontra revolusi G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Syarat untuk mencalonkan sebagai DPR, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II harus memenuhi aturan dalam Undang-Undang No 15 tahun 1969, yaitu :

- 1) Warga negara RI yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa.
- 2) Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf
- 3) Setia terhadap pancasila sebagai dasar ideologi negara
- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang
- 5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 6) Tidak sedang menjalani pidana penjara
- 7) Tidak terganggu kejiwaannya dan ingatannya
- 8) Terdaftar dalam daftar pemilih

⁴⁹ M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm 615

Seseorang yang menjadi calon dalam pemilihan umum harus diajukan oleh organisasi yang diakui. Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus memenuhi syarat yaitu bukan partai terlarang, dalam mengajukan bakal calon organisasi yang bersangkutan harus menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut telah di penuhi. Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota DPRD dan DPR partai dan Golongan Karya harus mengajukan nama-nama dan tanda gambar. Aturan ini berlaku untuk pemilihan berikutnya selama pemerintahan Orde baru.⁵⁰ Semua persyaratan itu harus dibuktikan keberadaannya dengan dua cara, yaitu dengan membuat surat pernyataan tentang keaslian syarat yang telah di isi dan menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh pihak berwajib seperti keterangan tentang kesehatan dan bebas dari G 30/S PKI.⁵¹

Pada pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan Golongan Karya. Golongan Karya mendapat dukungan pemerintah dan ABRI, pada tahun itu pemilihan umum dimenangkan oleh Golongan Karya, begitu pun pemilu tahun berikutnya. Pemilu kali itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD Tingkat I, DPRD tingkat II dan untuk DPR Tingkat pusat dilakukan dengan serentak. Pada masa Orde Baru munculnya gerakan menolak untuk terlibat dalam pemilu yang dilakukan oleh beberapa kelompok aktivis dan cendekiawan yang kemudian dikenal dengan Golongan Putih (GOLPUT) pada

⁵⁰ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 737 Menteri dalam Negeri: peraturan Nomor 12 Tahun 1969 tanggal 4 Desember 1969 tentang pedoman tata cara penerimaan wakil-wakil golongan karya dalam DPRD-GR TK. I dan II.

⁵¹ Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998), hlm 125.

tahun 1971.⁵² Untuk istilah penggunaan kata “Gotong Royong” yang terdapat pada DPRD pada masa Orde Lama dihilangkan karena tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah hasil pemilihan.⁵³

Setelah tahun 1971, pemilu yang menurut periodenya dan teratur mulai terlaksana. Pemilu yang ketiga dilakukan 6 tahun lebih setelah pemilihan yakni pada tahun 1977. Satu hal yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya pada tahun ini partai yang ikut serta hanya 2 dan 1 Golongan Karya, dikarenakan terjadi menyederhanakan jumlah partai. Kedua partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya.⁵⁴ Dalam pemilihan selanjutnya, yaitu tahun 1982, 1987, 1992 dan 1997 hasil dari pemilu tidak jauh berbeda dari pemilu tahun 1977 yaitu Golkar selalu menjadi pemenang.

Sistem pemilu tahun 1971 menganut sistem berimbang (proporsional) untuk semua wilayah Indonesia dalam hal pemilihan DPR, DPRD TK I, DPRD TK II. Sistem berimbang adalah pemilihan tidak langsung memilih calon yang didukung, nomor urut para calon ditentukan oleh masing-masing Partai Politik dan Golongan Karya. Peserta pemilih hanya memilih tanda gambar atau lambang,

⁵² *Ibid.*, hlm., 62

⁵³ Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1926-1988. No. Reg 694.

⁵⁴ Partai persatuan pembangunan yang bergabung dalam partai ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) dan partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) kedua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) partai yang bergabung didalamnya yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia (IPKI) ,Murba, Partai Katolik, dan partai kristen Indonesia (Parkindo). adapun rencana penyederhanaan Jumlah partai politik sudah di mulai sejak masa Soekarno, dikarenakan saat itu masing-masing partai politik masih demikian besar pengaruhnya sehingga sulit untuk menyederhanakan, masing-masing partai merasa mempunyai hak hidup yang sesuai dengan aliran atau ideologinya masing-masing. Dilihat pada Muhammad Rusli Karim, “perjalanan Partai Politik di Indonesia” (Jakarta: Rajawali,1983) hlm 172-173.

adapun jumlah kursi untuk DPR dan DPRD ditentukan dari jumlah penduduk (kepadatan penduduk di setiap daerah Provinsi di Indonesia) dan jumlah suara yang diperoleh. Calon yang terpilih untuk menjadi anggota DPRD ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang di susun oleh masing-masing partai maupun golongan. Sistem ini berlaku untuk pemilihan pada masa Orde Baru hingga tahun 1997.⁵⁵

Memasuki tahun 1971 untuk Daerah Makassar, dalam rangka perluasan Kotamadya daerah tingkat II Makassar dalam PP 51 tahun 1971, dibentuknya daerah kecamatan di Sulawesi Selatan. Selain itu diadakan perluasan batas-batas wilayah Makassar, terdapat tiga kabupaten yang dimasukkan dalam wilayah Makassar diantaranya Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene. Dengan diadakannya perluasan wilayah Makassar, maka nama Makassar mengalami perubahan menjadi Ujung Pandang.⁵⁶

Berdasarkan surat keputusan Presiden, pada tanggal 22 Juni 1978 dilakukan serah terima jabatan Gubernur dari Achmad Lomo kepada Andi Oddang yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam sidang pleno istimewa DPRD provinsi tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang. Pada tahun 1983-1993 diangkat H.A. Amiruddin sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, pengangkatan ini bukan dari kalangan militer melainkan elit sipil dari suku Bugis. Ada anggapan yang mengatakan bahwa

⁵⁵ Muhadam Labolo, Teguh Ilham "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122-138

⁵⁶ Pemda TK. I Sulawesi Selatan, *op.cit.* hlm. 513-522

Amiruddin mungkin memiliki hubungan dengan pihak pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan, sehingga pemerintah dengan mudah mengganti Gubernur dari kalangan militer terlebih pada masa itu posisi ketua DPRD TK 1 dan DPRD TK II wilayah Sulawesi Selatan di dominasi kalangan Militer.⁵⁷ Untuk jabatan walikota Kotamadya Ujung Pandang dijabat juga oleh orang militer yaitu Kol. Abustam (1978-1983), Kol Jancy Raib 1983-1988) dan Kol. Surwahyo (1988-1993) yang semuanya mempunyai latar belakang Militer.

Setelah H.A.Amiruddin berakhir masa pemerintahannya maka diangkatlah Brigjen H. Zainal Basri Palaguna sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selama dua periode (1993-2003) yang berasal dari suku Bugis. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan sejumlah konflik, terutama periode kedua seiring dengan munculnya gerakan Reformasi, ditandai dengan runtuhnya orde baru dan lengsernya Soeharto.⁵⁸

2.3.3 Masa Reformasi 1998-2004

Gerakan reformasi membuat rezim Orde Baru berakhir, banyak tujuan yang diharapkan bisa tercapai salah satunya membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 dan MPR mengangkat Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden. Pemilu yang idealnya dilakukan pada tahun 2002 tetapi atas desakan masyarakat dan mahasiswa untuk mengadakan reformasi serta pergantian anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan pemerintahan

⁵⁷ Jayadi Nas, *Konflik Elite di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Yayasan Massaile,2007), hlm.92-93

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 90

sebelumnya maka pemilu pun segera dilaksanakan. Di tengah kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan, Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan bebas, jujur dibandingkan dengan pemilu era Orde Baru. Walaupun terdapat banyak kelemahan dan kesalahan karena pemilu 1999 dipersiapkan dalam waktu terbatas. Ada yang berbeda dalam pemilihan kali ini, banyak partai politik yang ikut andil dalam pemilu. Hal ini didasarkan pada persyaratan pembentukan partai politik pada masa reformasi terbilang cukup longer sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk mendirikan partai politik. Ada 48 partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 1999,⁵⁹ karena banyaknya partai maka partai-partai yang sudah ada sejak dulu memanggil kembali kader yang berusia tua untuk masuk dalam pencalonan agar mencapai syarat mengikuti pemilu.

Sistem pemilu pada tahun 1999 sama dengan pemilu 1997 perhitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah anggota DPRD TK II yang terpilih berdasarkan keseluruhan hasil suara yang diperoleh partai politik tersebut di daerah tingkat II. Pada tahun ini partai demokrasi Indonesia keluar sebagai

⁵⁹ Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Indonesia Baru, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat IslamUmat, PNI-Front Marhaenis, Partai Pend. Km. Indonesia, Partai Republik, Partai IslamDemokrat, PNI-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat IslamIndonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik IslamIndonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia.

pemenang. Pada tahun 1999 penetapan calon masih berdasarkan nomor urut, untuk kepala daerah sendiri Mayer H. M. Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo pasangan Gubernur yang terpilih oleh DPRD hasil pemilu 1999.

Sejalan dengan itu adapun pemilihan pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pemilihan tahun 2004 diterapkan kebijakan mengenai aturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam penetapan kuota pada daftar calon. Setiap partai politik yang ikut dalam pemilihan dapat mengajukan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memuat paling sedikit 30% perempuan. Meskipun aturan ini tidak diterapkan dengan baik dikarenakan masih banyak partai yang tidak mencapai kuota tersebut dan beberapa mengabaikan. Pada tahun ini juga diadakan pemilihan Presiden. Untuk sistem pemilihan di tahun 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka. Sistem baru ini memungkinkan pemilih untuk dapat memilih calon legislatif yang dicoblos. Selain itu pada struktur surat suara telah menampilkan gambar partai politik beserta daftar nama calon legislatif yang diusung oleh partai tersebut.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung dan dilaksanakan sebanyak dua kali karena memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, pada pemilu kali ini H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang dan mengalahkan pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri

dengan wakilnya K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pemilu dilaksanakan serentak pada tanggal 5 April 2004.

Pada tahun 2004 selain terlaksananya pemilu juga terjadi pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan yaitu daerah Mandar, Majene, Polewali, dan Mamasa yang ingin melepas diri dari wilayah Sulawesi Selatan dan membentuk Provinsi Baru yaitu Sulawesi Barat. Sehingga pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2004, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Barat untuk disahkan. Akhirnya Presiden RI menandatangani Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Oktober 2004.⁶⁰

⁶⁰ Edward L. Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*, (Makassar:De Lamacca,2012), hlm. 147.